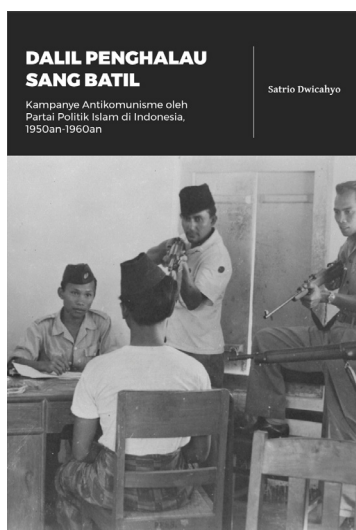


## Isu “Islam Sejati”: Alih-Alih Sebuah Propaganda Anti-PKI

**IFAN MAULANA ISHAK**

Mahasiswa Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: [ifanlana@gmail.com](mailto:ifanlana@gmail.com)



**Title:**

Dalil Penghalau Sang Batil: Kampanye Antikomunisme oleh Partai Politik Islam di Indonesia, 1950an-1960an

**Author:**

Satrio Dwicahyo

**Publisher:**

Penerbit Terang (2022)

**Pages:**

xi + 165

**ISBN:**

978-602-51805-5-2

Buku ini menjelaskan proses di balik produksi kampanye politik partai Islam yang melibatkan wacana keislaman untuk “menyerang” Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1950-an hingga akhir 1960-an. Satrio Dwicahyo dalam buku yang baru diterbitkannya, *Dalil Penghalau Sang Batil: Kampanye Antikomunisme oleh Partai Politik Islam di Indonesia 1950-an-1960-an* menggunakan narasi tersebut sebagai alasan dasar analisis dalam buku ini. Penulis juga menekankan bagaimana peristiwa puncak konflik antara Islam dan kelompok komunisme pada 1965 terekam dalam wacana keagamaan (dalam hal ini Islam) sebagai bentuk kebaruan dengan sejumlah penelitian tentang konflik 1965 yang sudah ada sebelumnya. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan penciptaan diskursus keislaman yang berkaitan dengan kompetisi politik, juga mencoba mengidentifikasi bentuk hubungan antara agama dan negara dalam sebuah peristiwa politik. Terakhir, bermaksudnya juga untuk memberikan sudut pandang baru terhadap historiografi Indonesia periode di seputar 1965.

Kegiatan pengumpulan sumber dilakukan di berbagai tempat mulai dari Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Pusat UGM, Jogja Library Center (Joglib), Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional RI, Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hingga perpustakaan

pribadi milik Bapak Tjahjono Prasodjo & Ibu Endah Setyowati serta sumber penunjang lainnya seperti majalah dan koran. Secara garis besar struktur penulisan terbagi atas tiga pembabakan, yakni, *pertama*, mengenai akar pertentangan Islam dan komunisme. *Kedua*, periode puncak pertentangan antar keduanya, 1955-1965. *Ketiga*, persinggungan kelompok Islam, komunisme, dan rezim Orde Baru.

Melacak akar polarisasi dalam masyarakat Islam dan komunisme akan tertuju pada cerita Haji Misbach dan Muhammadiyah yang terjadi pada sekitar tahun 1920-an. Konflik antara “Haji Merah” dengan Muhammadiyah tersebut telah secara rinci direkam dalam buku *Zaman Bergerak*. Akhirnya pada 1922 Misbach keluar dari Muhammadiyah dan masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Maret 1923. Misbach di dalam PKI juga berbicara tentang kemiripan mendasar antara Islam dan komunisme. Setelah periode singkatnya di dalam PKI daerah Vorstenlanden, Misbach diasingkan ke Manokwari pada Juli 1924, dan selanjutnya akan dikenal sebagai seorang komunis Islam paling terkemuka (Shiraishi, 1997: 343).

Namun, menurut Dwicahyo munculnya ide-ide keselarasan dan pertentangan antara kelompok Islam dengan kelompok komunis tidak hanya datang dari pendapat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Islam dan komunisme adalah bertentangan, tetapi juga adanya gerakan radikalisme kelompok komunis yang memicu pemberontakan terhadap pihak pemerintah kolonial. Ruth T. McVey dalam bukunya *The Rise of Indonesian Communism* menceritakan alasan radikalisme pemberontakan ini bahwa, “Propaganda saja tidak cukup bagi partai untuk meraih kekuasaan negara. Karenanya kita harus mulai mengambil langkah luar biasa untuk menyatukan dan memperkuat diri kita. Tekanan kita tidak lagi pada propaganda tapi sebagian besar diarahkan pada rakyat yang sudah tertarik dengan propaganda kita untuk kemudian melatih mereka untuk mempersiapkan dan melakukan perlawanan. Anggota partai revolusioner yang ambil bagian dalam perlawanan dikatakan sebagai prajurit partai, karena itu kita harus mengajar mereka mulai dari sekarang untuk bertindak layaknya prajurit, bagaimanapun kita terhalang untuk melakukan hal ini karena adanya larangan untuk mengadakan pertemuan (McVey, 2010: 569).” Radikalisasi ini memberi dampak pada 1926. Sejak tahun itu pemerintah kolonial secara sangat reaktif berupaya membasmi kelompok komunis. Partai Komunis Indonesia secara resmi dilarang, aktivis dan pengikutnya ditangkap, ditembak, dipenjara, diadili, dan banyak yang diasingkan ke Digul.

Kemudian, pada periode selanjutnya persinggungan juga terjadi antara Nahdlatul Ulama dengan PKI terjadi di Madiun secara intensif menjelang peristiwa tahun 1948. Nahdlatul Ulama (NU) secara sederhana menganggap bahwa serangan dan teror PKI terhadap ulama adalah serangan anti-Islam yang dimotori oleh kelompok materialis dan ateis. Jika dibandingkan,

serangan kelompok komunis kepada NU pada penghujung 1940-an memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada 1920.

Dalam buku ini Dwicahyo berpendapat bahwa akar pertentangan paling logis adalah adanya kompetisi politik antara Islamis dan Komunis sepanjang 1948-1955. Kompetisi politik semakin jelas saat kelompok politik Islam mendirikan Masyumi dan cukup sejak tahun 1945. Apalagi Masyumi menghimpun organisasi-organisasi Islam yang sudah ada sebelum tahun 1945. Ketegangan politik dalam negeri, pengaruh kekuatan luar negeri, serta corak politik masyarakat menambah panas ketegangan antara kelompok Islam dan komunis hingga terjadi pula konflik terbuka. Akhirnya, muncullah dua kubu di dalam tubuh kabinet antara kekuatan Islam besar, yakni NU dan Masyumi dengan kubu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan PKI. Bagi NU, perjuangan menjadi semakin sulit saat Masyumi menunjukkan kecenderungan kepada Blok Barat, termasuk ketika berjalan bersama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 1958.

Pada Februari 1957, Presiden Sukarno mendeklarasikan “Konsepsi Presiden”. Isi dari Konsepsi adalah gagasan Sukarno untuk mengganti sistem politik yang liberal. Peter Kasenda di dalam *Sarwono Edhie dan Tragedi 1965* menyebutkan bahwa ketakutan Sukarno pada sistem politik tersebut berdampak terhadap banyaknya kemunculan pemberontakan bersenjata di daerah-daerah yang dikendalikan oleh tokoh politik dan militer. Namun, Konsepsi ini mendapat penolakan dari lawan politik Sukarno, sehingga tensi perseteruan politik semakin memuncak dan menuju krisis politik (Kasenda, 2015: 13).

Puncak pertentangan terjadi antara 1955-1965. Periode ini menjadi legitimasi atas sikap kelompok Islam terhadap komunis dan mulai diterjemahkan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan. Sejak awal 1955 kelompok-kelompok politik Islam hampir seluruhnya terfokus kepada wacana persiapan pemilu pada bulan September. Pada tahun yang sama pula kampanye-kampanye untuk menentang PKI telah nyaring disuarakan oleh Masyumi. Kampanye itu dianggap Aidit sebagai “pekerdjaan kaum imperalis”. Lebih jauh, Aidit menyebutkan bahwa Masyumi menggunakan kedok agama dalam politik serta menyangsikan bahwa kesamaan agama (sama-sama Islam) tidak akan berdampak bagi persatuan nasional.

Kecaman dari pihak Masyumi tentu memunculkan reaksi kepada kelompok komunis menjelang Pemilu 1955. Kecaman tersebut didasari atas keputusan internal mereka yang dicetuskan oleh Dewan Sjuro pada Desember tahun sebelumnya. Pertemuan bertajuk “Hukum Islam terhadap Komunisme” menjabarkan lima poin yang menjelaskan “dosa” komunis, yakni materialisme historis, komunisme memusuhi agama dan memungkiri keberadaan Tuhan, komunisme menyalakan ikatan keluarga dan menjadikan wanita milik bersama, menyalakan hak perseorangan atas alat-alat produksi dan kekayaan,

dan komunisme memperjuangkan dan melaksanakan cita-citanya dengan sistem diktator-proletar.

Poin menarik dalam buku ini adalah sikap yang diambil oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu badan otonom NU. Gerakan Pemuda Ansor bereaksi setelah adanya jatuhnya keputusan Masyumi yang tidak diikuti oleh NU, mereka mengutarakan protes terhadap sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menghadapi PKI. Ketidaktepahaman PBNU dan GP Ansor tersebut masih berlangsung sepanjang 1950-an hingga 1960-an. Salah satu hal yang membuat GP Ansor dalam banyak hal lebih responsif terhadap kelompok komunis dibandingkan PBNU adalah karena kejadian-kejadian di “daerah” dalam kasus yang mereka sebut “penghinaan agama”.

Terdapat aspek lain di luar respons partai politik Islam terhadap komunisme, yakni adanya pembentukan ideologi anti-komunisme. Aspek di luar politik tersebut adalah ranah kebudayaan sebagai saluran pengukuhan ideologi dalam rangka mencari identitas nasional. Pertarungan pencarian identitas yang tadinya berada dalam ranah kebudayaan, kemudian berkembang juga pada ranah politik. Akibatnya, aktivitas kebudayaan pun masuk lingkup nuansa politik Perang Dingin. Hal ini terjadi karena kekuatan politik Blok Barat yang didukung Amerika Serikat (AS) turut membantu aktivitas pendidikan dan kebudayaan dalam negeri Indonesia. Dukungan tersebut berupa pendanaan-pendanaan yang tujuannya mematikan kelompok komunisme (Herlambang, 2013: 58).

Sehingga sikap GP Ansor pada tahun 1965-1966 paling sering dinyatakan bersalah oleh banyak pihak, terutama terkait peran mereka pada sejumlah pembunuhan pihak-pihak yang terduga komunis. Tindakan tersebut di luar kendali PBNU, sesuatu yang bahkan telah terjadi sejak awal 1950-an. Perbedaan cara PBNU dan GP Ansor dalam menyikapi PKI menunjukkan adanya lapisan-lapisan yang berbeda dalam konflik antara kelompok Islam dan PKI, sikap lapisan atas NU tersebut sangat memperhatikan keadaan politik dan benar-benar menjaga sikap moderat. Sementara lapisan bawah atau akar rumput yang lebih reaktif didorong oleh benturan-benturan langsung yang disebabkan oleh banyak masalah seperti persoalan agraria dan aksi-aksi kriminalitas.

Periode 1955-1965 adalah masa ketika konflik Islam dan komunis memuncak. Konflik tersebut dimulai oleh Masyumi yang begitu vokal dalam menyuarakan ketidaksetujuannya dengan PKI hingga berujung pada konsekuensi dilarangnya partai tersebut. Konflik tersebut lantas dilanjutkan oleh NU yang bersikap sangat hati-hati dalam menyuarakan sikapnya pada PKI. Kehati-hatian NU berdampak pada terpecahnya NU menjadi dua lapisan, lapisan pertama adalah lapisan elite *syuriah* dan *tanfidziah* yang memiliki pertimbangan lebih rumit jika dibandingkan dengan lapisan “lapangan” yang terdiri dari GP Ansor dan Banser.

Puncak konflik tersebut disebabkan karena kedua kelompok memiliki kedudukan dan ruang gerak politik yang besar sehingga memungkinkan mereka bermanuver dengan leluasa. Ruang gerak politik yang besar itu sendiri diberikan oleh Sukarno sebagai tokoh sentral masa itu, ia berusaha memberikan ruangan yang sama besar bagi kelompok nasionalis, Islam dan komunis. Suatu komposisi yang dianggap mustahil oleh kelompok Islam dan komunis. Dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode terakhir ketika kelompok Islam dan komunis mengalami konflik secara “seimbang”.

## Referensi

- Fealy, Greg dan Robin Bush. 2014. “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama.” *Asian Journal of Social Science* 42 (5).
- Fealy, Greg dan Katharine McGregor. 2010. “Nahdlatul Ulama and the Killings of 1965-66: Religion, Politics, and Remembrance.” *Cornell University Press: Southeast Asia Program Publications at Cornell University* 89.
- Kaseda, Peter. 2015. Sarwo Edhie dan Tragedi 1965. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama.
- McVey T, Ruth. 2009. *Kemunculan Komunisme Indonesia*, terj. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kuswono, dkk. 2019. “Menyandingkan Ajaran Islam dan Komunisme: Pemikiran Haji Misbach (1912-1926).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 8 (2).
- Wijaya Herlambang. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Idris Harahap. 2020. “Mardian, Ulama dan Politik: Studi terhadap Pemikiran dan Kiprah Sosial Politik Syekh M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.